

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan batang angkola di kabupaten Tapanuli Selatan : era otonomi daerah

Doharni Susilawaty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=106408&lokasi=lokal>

Abstrak

Perubahan yang dihembuskan lewat reformasi pada akhir 1997 dan mencapai puncaknya pada Mei 1998, telah membawa banyak perubahan yang sangat besar. Perubahan tersebut tidak hanya di tingkat negara, tetapi merambat sampai ke daerah kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa-desa. Dalam bidang tata pemerintahan terjadi pula perubahan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berimplikasi pada kewenangan dan kebijakan yang sebelumnya di era ORBA adalah dominan one hand control atau sentralisasi mulai didesentralisasikan kepada daerah melalui pemberian otonomi daerah. Hal ini secara langsung membuka peluang bagi masyarakat di tingkat lokal baik Kabupaten/Kota, kecamatan sampai di desa/kelurahan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara partisipatif dan berperan lebih aktif dalam mengisi pembangunan tersebut sesuai kebutuhan, kemampuan/potensi, kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keanekaragaman daerah.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 telah memberikan jaminan legal formal kepada masyarakat di daerah untuk terlibat juga di dalam pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan khususnya di kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi untuk berpartisipasi dalam mengusung keinginan mereka agar kecamatan Batang Angkola dimekarkan dan Kecamatan Sayur Matinggi menjadi kecamatan definitif baru.

Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ruang partisipasi yang kondusif serta jalur akses yang tepat untuk memfasilitasi aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat. Karena partisipasi tidak terjadi di dalam ruang hampa, dan partisipasi adalah sebuah dinamika.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan pemekaran direspon saat penyampaian Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor. 130.04 /7134 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Tapanuli Selatan TA. 2000 dengan tanggapan positif dari beberapa fraksi di DPRD. Dimana disebutkan bahwa kegiatan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah hendaknya lebih di tujukan pada penyempurnaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsi dan peran aparat pemerintah desa. Supaya tetap terpelihara, ditingkatkan dan dikembangkan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargai prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mengisi pembangunan.

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Kecamatan Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan era otonomi daerah (2001-2003), apakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola adalah partisipasi yang murni/otonom/mandiri atau partisipasi mobilisasi/manipulasi atau gabungan keduanya. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel (Informan) menggunakan Teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang mengetahui topik penelitian dan merupakan para pelaku dan secara langsung mengikuti proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (2001-2003). Penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola ini mengacu kepada pendapat dan teori para ahli yaitu Soetrisno Loekman, Abe, Okley dan IDS (International Development Studies). Secara garis besar dapat disimpulkan Partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam upaya perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (Agustus 2001 sampai pada bulan April tahun 2003) hanya berada pada pelaksanaan forum sosialisasi perencanaan pemekaran kecamatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Bentuk partisipasi berupa dukungan dana, beras, tanah ulayat, keahlian dan ketrampilan, pendapat dan masukan serta upaya masyarakat dalam forum tersebut untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil serta inisiatif membentuk Forum Peduli Kecamatan Pembantu Batang Angkola Jae (09 Februari 2001) sebagai forum yang berupaya menekan dan mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten dalam kebijakan pemekaran kecamatan Batang Angkola. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola, di antaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Kondisi masyarakat yang masih kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dan makna partisipasi itu sendiri, adalah kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersifat apatis, diam dan ?nrimo? (budaya diam) terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola tersebut juga menghambat pelaksanaan konsultasi, diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat. Faktor penghambat lain adalah adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan masyarakat bersifat pasif, mengekor dan takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk. Di samping itu kendala lainnya adalah masih minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal belum adanya pedoman mekanisme perencanaan pemekaran kecamatan, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan kontrol serta belum dijadikannya variabel partisipasi masyarakat dalam tata cara pembentukan kecamatan.

Mengingat pentingnya Forum Perencanaan Pemekaran Kecamatan dan Musrenbang sebagai sarana dan ruang publik bagi masyarakat kecamatan, maka perlu dilakukan perubahan cara berpikir, prosedur, mekanisme dan cara bertindak dalam perencanaan pemekaran kecamatan ke depannya. Selain itu telah dibuktikan bahwa tidak selamanya mobilisasi itu buruk, mengingat masyarakat Indonesia telah cukup lama berada dalam suasana pemerintahan sentralistik-otoriter sekalipun dalam tata pemerintahan sudah mengalami reformasi. Perubahan perlu dilakukan secara perlahan dengan melihat kepada kondisi nyata dan sosial budaya masyarakat setempat.